

**TESIS**  
**KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM**  
**KEGIATAN PERTANIAN DI KABUPATEN BIMA-**  
**NTB**



**BUN HERMIN**  
**No. Mhs.: 205203314**

**PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2023**





**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : BUN HERMIN  
Nomor Mahasiswa : 205203314  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : **KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM KEGIATAN  
PERTANIAN DI KABUPATEN BIMA-NTB**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.	.....	
2. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.	.....	



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : BUN HERMIN  
Npm : 205203314  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : **KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM  
KEGIATAN PERTANIAN DI KABUPATEN BIMANTB.**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal  
10/April/2023

Dewan Penguji	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum	
2. Sekertaris	Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.	
3. Anggota	Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.	

**Ketua Program Studi**

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Murti Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUN HERMIN

Nomor Mahasiswa : 205203314

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

**“KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH  
KABUPATEN BIMA DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI KABUPATEN  
BIMA-NTB”**

Adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 April 2023

Yang menyatakan :



BUN HERMIN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmad dan karunianya sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Kepastian Hukum Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Kegiatan Pertanian Di Kabupaten Bima-NTB” dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan mendorong penulis, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan yang saya kasihi :

1. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.HUM, selaku Pembimbing I/ Penguji yang telah membantu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rithi, S.H, LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan selaku Pembimbing II/ Penguji yang telah membantu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, SH., M.HUM, selaku Anggota/Penguji yang telah memberikan masukan dan petunjuk bagi perbaikan penyusunan tesis ini.

4. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak A. Fandi dan Ibu Mas'ah, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan setiap harinya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ucapan terimakasih dan hormat penulis yang begitu besar kepada Paman Ace, yang selalu mengingatkan dan selalu mendukung penulis dalam setiap perjuangan penulis. Terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari penulis.
7. Saudari Nurhayati yang juga ikut menemani dan menyemangati penulis dalam penulisan tesis ini Terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan hingga penulisan ini selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan bagi tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat 7 bagi pembaca pada umumnya dan dunia Pendidikan teerkhususnya pada bidang ilmu hukum, terkait hukum tata negara.

## DAFTAR ISI

ABSTAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batas Konsep.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pertanian .....	17
B. Tinjauan-tinjauan tentang Kegiatan Pertanian, Kepastian Hukum, dan Pemerintah Daerah .....	37
C. Landasan Teori .....	43
1. Kebijakan Publik.....	43
2. Kepastian Hukum.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	52

A. Jenis Penelitian .....	52
B. Pendekatan .....	52
C. Data Primer .....	52
D. Cara Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis .....	54
BABA IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Gambaran Umum Kabupaten Bima .....	57
B. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dalam Sektor Pertanian .....	62
C. Kepastian Hukum Dalam Sektor Pertanian .....	62
D. Kebijakan Pemerintah Dalam Sektor Pertanian .....	74
E. Kendala dan Solusi .....	84
BAB V PENUTUP .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94
DAFTAR LAMPIRAN .....	



## ABSTRAK

Penelitian Kepastian Hukum Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Kegiatan Pertanian Di Kabupaten Bima-NTB. Bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang mengatur sektor pertanian, kemudian kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bima dalam upaya melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi petani di sektor pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi Pustaka. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah telah berusaha memberikan perlindungan maupun kepastian hukum bagi masyarakat di sektor pertanian dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan yang mengatur sektor pertanian, khususnya yang terkait dengan masalah pupuk dan standarisasi harga penjualan hasil tani. Akan tetapi peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang ada masih ada celah yang bisa merugikan petani dengan tidak adanya standarisasi harga atau penetapan harga bawang merah yang sering terjadi masalah setiap tahunnya di Kabupaten Bima, juga dalam penerapannya cenderung tidak sesuai dengan ketentuan atau ketentuan peraturan-peraturan yang ada. Maka, pemerintah harus menerapkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dari peraturan yang sudah ada, dan juga dalam penerapannya harus di awasi supaya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang sudah ada.

## ABSTRACT

*Research on Legal Certainty in Public Policy of the Bima Regency Government in Agricultural Activities in Bima Regency, NTB. Aims to find out and review the laws and regulations or policies that regulate the agricultural sector, then what policies are implemented by the regional government of Bima district in an effort to protect and provide legal certainty for farmers in the agricultural sector. This research is a normative research with a statutory regulation approach. The data source is in the form of secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data collection using library research. Primary legal materials and secondary legal materials were analyzed using legal analysis methods. The deductive thinking process is used to draw conclusions. The results of this study indicate that the Government and Regional Governments have tried to provide protection and legal certainty for people in the agricultural sector by enacting various laws and policies that regulate the agricultural sector, especially those related to the issue of fertilizers and the standardization of selling prices for agricultural products. However, the existing regulations or policies still have loopholes that can harm farmers in the absence of price standardization or price fixing for shallots which often have problems every year in Bima Regency, also in their application they tend not to be in accordance with the provisions or provisions of the regulations.*

*existing regulations. So, the government must apply or implement the provisions of the existing regulations, and also in its application must be monitored so as not to deviate from the provisions of the existing regulations.*

